

**Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024).****Achmad Rizki Edinbur , Raden Cahyo Prabowo**

Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno Jakarta

**Email : redinbur@gmail.com, cahyo.2035@gmail.com****ABSTRAK**

Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini berjudul Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024). maka penelitian ini ingin menggambarkan tentang opini warga Jakarta Pusat (Studi Analisis Robert J Schreiter). Karena alasan bisa mengetahui sejauh mana opini masyarakat khususnya Jakarta Pusat tentang PEMILU 2024 ini maka, Penelitian ini dilakukan karena warga Jakarta Pusat ingin melihat perkembangan politik tanah air Indonesia. Penelitian ini, memberi gambaran tentang opini masyarakat tentang Pemilu 2024 PILEG, PILKADA & PILPRES khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Pada penelitian ini metodologi penelitian ini menggunakan Pendekatan yang digunakan kualitatif,. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan wawancara mendalam dan tipe penelitiannya studi analisis. Data yang digunakan dalam menganalisis penelitian adalah data kualitatif. kemudian menghasilkan jawaban mengenai

Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024).

Kata Kunci : Analisis Robert J.Schreiter, Opini Publik, Demokrasi, Politik,Warga.

**Abstract**

General elections, which are abbreviated as elections, are closely related to political issues and leadership changes. Reporting from the official website of the General Elections Commission, in a democratic country, elections are one of the main pillars of the process of accumulating the will of the people. Elections are also a democratic process to choose leaders. Election is a means of implementing people's sovereignty which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly within the Unitary State of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In other words, elections are a means for the people to exercise sovereignty and is a democratic institution. So that the election is the driving force of the mechanism of the Indonesian political system. Until now, the election is still considered as an important state event. This is because elections involve all the people directly. Through elections, the people can also express their wishes in politics or the state system. Elections are a form of democracy and one of the important aspects to be implemented democratically. All modern democracies carry out elections. But not all elections are democratic. Because democratic elections are not just symbols, but elections that must be competitive, periodic, inclusive (wide), and definitively to determine the government.

Therefore, the researcher conducted this research entitled Opinion of the Citizens of Central Jakarta (Analysis Study of ROBERT J. SCHREITER in the 2024 ELECTION). so this study wants to describe the opinions of residents of Central Jakarta (Robert J Schreiter's Analysis Study). For the reason of being able to find out the extent of public opinion, especially Central Jakarta regarding the 2024 General Election, this research was conducted because the residents of Central Jakarta wanted to see the political developments of the Indonesian homeland. Central Jakarta. In this study, the research methodology used a qualitative approach. The sampling technique uses in-depth interviews and the type of research is analytical study. The data used in analyzing the research is qualitative data. then generate answers regarding

Central Jakarta Citizens' Opinion (Analysis Study of ROBERT J. SCHREITER in the 2024 General Election).

Keywords: Analysis of Robert J. Schreiter, Public Opinion, Democracy, Politics, Citizens.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, Jakarta Raya) adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang mempunyai status setingkat provinsi. Jakarta terletak di anggota barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah diketahui dengan nama Sunda Kelapa (sebelum 1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia/Batauia, atau Jaccatra (1619-1942), dan Djakarta (1942-1972). Di dunia internasional Jakarta juga mempunyai julukan seperti J-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian sebab dianggap kota yang sebanding New York City (Big Apple) di Indonesia.

Jakarta mempunyai lapang sekitar 664,01 km<sup>2</sup> (lautan: 6.977,5 km<sup>2</sup>), dengan masyarakat berjumlah 9.603.417 jiwa (2013). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan paling besar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.

Untuk pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan lokasi berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi lokasi posisi lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN.<sup>1</sup>

Bentuk lain ejaan nama kota ini telah semenjak lama dipergunakan. Sejarawan Portugis João de Barros dalam *Décadas da Ásia* (1553) menyebutkan keberadaan "Xacatara dengan nama lain Caravam (Karawang)". Sebuah dokumen (piagam) dari Banten (k. 1600) yang dibaca pandai epigrafi Van der Tuuk juga telah mengatakan istilah wong Jaketra, demikian pula nama Jaketra juga disebutkan dalam surat-surat Sultan Banten dan Sajarah Banten (pupuh 45 dan 47), sebagaimana diteliti Hoessein Djajadiningrat. Laporan Cornelis de Houtman tahun 1596 mengatakan Pangeran Wijayakrama untuk koning van Jacatra (raja Jakarta).

**Sunda Kelapa (397–1527)**

---

<sup>1</sup> [http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Daerah-Khusus-Ibukota-Jakarta\\_12550\\_p2k-unkris.html#Sejarah](http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Daerah-Khusus-Ibukota-Jakarta_12550_p2k-unkris.html#Sejarah) akses pada pukul 09.36 WIB Tanggal 09 September 2021

Jakarta pertama kali diketahui untuk salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kalapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota Kerajaan Sunda yang diketahui untuk Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran (sekarang Bogor) dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kalapa selama dua hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dipunyai Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk.

Sunda Kalapa yang dalam teks ini dikata Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting sebab dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang dikata dengan nama Dayo (dalam bahasa Sunda modern: dayeuh yang manfaatnya ibu kota) dalam tempo dua hari. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada ratus tahun ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah benar semenjak ratus tahun ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang dikata Sundapura.

Pada ratus tahun ke-12, pelabuhan ini diketahui untuk pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang ketika itu.

### **Jayakarta (1527–1619)**

Bangsa Portugis merupakan Bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Pada ratus tahun ke-16, Surawisesa, raja Sunda menginginkan bantuan Portugis yang benar di Malaka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa untuk perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda.

Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun seloka Mundinglaya Dikusumah, dimana Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Mundinglaya.

Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Orang Sunda mengatakan peristiwa ini tragedi, sebab penyerangan tersebut membunghanguskan kota pelabuhan tersebut dan membunuh banyak rakyat Sunda di sana termasuk syahbandar pelabuhan.

Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro, wali kota Jakarta, pada tahun 1956 adalah sesuai tragedi pendudukan pelabuhan Sunda Kalapa oleh Fatahillah pada tahun 1527.

Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang manfaatnya "kota kemenangan".

Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon, menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi sultan di Kesultanan Banten.

### **Batavia (1619–1942)**

Pasukan Pangeran Jayakarta menyerahkan tawanan Belanda kepada Pangeran Jayakarta

Orang Belanda datang ke Jayakarta sekitar penghabisan ratus tahun ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal ratus tahun ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen merebut Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan belakang mengubah namanya menjadi Batavia.

Selama kolonialisasi Belanda, Batavia mengembang menjadi kota yang besar dan penting. (Lihat Batavia). Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak untuk pekerja.

Banyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Keliruku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang belakang membentuk komunitas yang diketahui dengan nama suku Betawi.

Waktu itu lapang Batavia hanya mencakup daerah yang ketika ini diketahui untuk Kota Tua di Jakarta Utara. Sebelum kedatangan para budak tersebut, sudah benar warga Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti warga Jatinegara Kaum.

Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang, pada zaman kolonialisme Belanda, membentuk wilayah komunitasnya masing-masing. Maka di Jakarta benar wilayah-wilayah bekas komunitas itu seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Manggarai.

Pada tanggal 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari ke luar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Dengan berakhirnya Koningsplein (Gambir) pada tahun 1818, Batavia mengembang ke arah selatan.

Tanggal 1 April 1905 di Ibukota Batavia diproduksi dua kotapraja atau gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis. Tahun 1920, Belanda membangun kota taman Menteng, dan wilayah ini menjadi lokasi baru untuk petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Pada tahun 1935, Batavia dan Meester Cornelis (Jatinegara) telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya.

Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih lapang. Di Pulau Jawa diproduksi pemerintahan otonom provinsi. Provincie West Java adalah provinsi pertama yang diproduksi di wilayah Jawa yang diformalkan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) 1926 No. 326, 1928 No. 27 jo No. 28, 1928 No. 438, dan 1932 No. 507. Batavia menjadi salah satu keresidenan dalam Provincie West Java disamping Banten, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon.

### **Jakarta (1942–Sekarang)**

Pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati masyarakat pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan lokasi dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda mencapai pengakuan kedaulatan tahun 1949.

Sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan anggota dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status Kota Djakarta merasakan perubahan dari sebuah kotapraja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara. Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu diterapkan langsung oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno.

Semenjak diterangkan untuk ibu kota, masyarakat Jakarta melonjak sangat pesat belakang suatu peristiwa kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hampir seluruh terpusat di Jakarta.

Dalam waktu 5 tahun masyarakatnya berlipat lebih dari dua kali. Berbagai kantong permukiman kelas menengah baru belakang mengembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.

Pada ketika pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, selang lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada ketika ini pula Poros Area Merdeka-Thamrin-Sudirman mulai dikembangkan untuk pusat bisnis kota, menggantikan poros Area Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara.

Pusat permukiman besar pertama yang diproduksi oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah (oleh PT Pembangunan Jaya) pada penghabisan dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan.

Laju perkembangan masyarakat ini pernah coba ditekan oleh gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta untuk "kota tertutup" untuk pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berlangsung dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Sampai ketika ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi belakang suatu peristiwa kepadatan masyarakat, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan peralatan transportasi umum yang memadai.

Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak etnis Tionghoa. Gedung MPR/DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.<sup>2</sup>

Daerah Khusus DKI Jakarta memiliki sebuah otonomi khusus yang dimana otonomi daerah yang memiliki secara kekhususan dan Otonomi Khusus di miliki oleh DKI Jakarta jelas berbeda dengan otonomi daerah lainnya.

---

<sup>2</sup> [http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Daerah-Khusus-Ibukota-Jakarta\\_12550\\_p2k-unkris.html#Sejarah](http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Daerah-Khusus-Ibukota-Jakarta_12550_p2k-unkris.html#Sejarah) akses pada pukul 10.00 WIB Tanggal 09 September 2021

Semua masyarakat di daerah Indonesia ingin berbondong-bondong ke DKI Jakarta, untuk mencari tempat rezeki, mengubah nasibnya dll sehingga Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta sering disinggah oleh para kaum urban dari daerah berkunjung ke DKI Jakarta.

Dalam membangun Daerah Khusus DKI Jakarta, Apalagi dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka masyarakatnya sudah mulai membuat opini publiknya sebagai aspirasi elemen masyarakat guna membangun DKI Jakarta berkelanjutan.

Berbagai pendapat atau opini juga muncul menanggapi proses pembangunan ini. Istilah opini publik dapat dipergunakan untuk menandakan setiap pengumpulan pendapat yang dikemukakan individu-individu. Opini publik berasal dari bahasa Inggris Public Opinion.

Menurut Soenarjo, dalam bukunya Opini Publik, opini publik dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan pendapat umum, dengan demikian public diterjemahkan dengan umum sedangkan opinion dialihbahasakan dengan pendapat. Dalam ilmu komunikasi terdapat istilah lain, yaitu Public Relations yang umumnya diterjemahkan dengan Hubungan Masyarakat. Dalam hal ini public diterjemahkan dengan masyarakat, sedangkan relations (sebenarnya kata jamak) diterjemahkan dengan hubungan (1984:22).

Opini menurut Cutlip dan center adalah pernyataan tentang sikap mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial (dalam Olli dan Erlita, 2011: 39). Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat berbeda-beda. Opini adalah serapan dari bahasa asing (opinion).

Merupakan tanggapan atau jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata (intangible), baik dalam bentuk opini tertulis maupun lisan. Bisa juga sebagai perilaku, sikap tindak, pandangan dan tanggapan dan lain sebagainya.

Opini dapat dinyatakan secara aktif dan pasif, verbal (lisan) dan baik secara terbuka dengan melalui ungkapan kata-kata yang dapat ditafsirkan dengan jelas, maupun melalui pilihan kata yang halus atau diungkapkan secara tidak langsung, dan dapat diartikan secara konotatif atau persepsi (personal). Opini dapat dinyatakan melalui perilaku, sikap tindak, mimik muka atau bahasa tubuh (body language) atau berbentuk simbol-simbol tertulis.

Padanan kata society dari bahasa Inggris adalah masyarakat. Pengertian publik pada Public Relations opinion dan Public Relations dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama, sedangkan dalam bahasa Indonesia pengertian umum dan masyarakat itu berbeda. Kendati demikian, pada



kenyataannya terjemahan public opinion menjadi pendapat umum dan Public Relations menjadi hubungan masyarakat, telah diterima secara luas.

Opini juga diartikan sebagai pendapat atau pandangan tentang suatu persoalan.<sup>3</sup> Ketika seseorang beropini terhadap suatu permasalahan yang sama akan menimbulkan penilaian yang berbeda, hal itu dikarenakan opini memiliki sifat subyektif yang artinya menurut pandangan sendiri-sendiri.

Opini merupakan kata yang berarti tanggapan atau jawaban terhadap sesuatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata, bisa juga berupa perilaku, sikap, tindakan, pandangan, dan tanggapan.

Sedangkan pendapat lain mengatakan opini adalah ekspresi sikap dengan melalui jawaban positif untuk informan yang mendukung, jawaban netral dan negatif untuk jawaban yang tidak mendukung, artinya apabila seseorang beropini positif tandanya orang tersebut mendukung, dan apabila seseorang beropini negatif artinya orang tersebut menolak.

Menurut Sastropetro dalam Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial, pendapat adalah suatu hasil interaksi dan pemikiran manusia tentang suatu hal yang kemudian dinyatakan atau diekspresikan (1990:1). Dalam kaitannya dengan proses komunikasi terdapat efek, dan salah satu jenisnya adalah pendapat. Sastropetro mengemukakan efek komunikasi adalah segala perubahan yang terjadi di pihak komunikan sebagai akibat diterimanya suatu pesan oleh komunikan.

Perubahan yang dimaksud antara lain; perubahan pandangan, perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan tingkah laku dan perubahan lain-lain yang terjadi pada komunikan atau manusia penerima pesan.

Pembahasan mengenai opini publik pasti tidak bisa lepas dari isu. Isu menurut definisi dari Coombs dalam bukunya *Ongoing Crisis Communication* (2007:23) merupakan salah satu jenis dari masalah yang dapat mempengaruhi organisasi.

---

<sup>3</sup> Abdullah, *Press Relation*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.14

Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang diterima oleh organisasi. Isu-isu yang berkembang di sekitar organisasi disebabkan oleh perubahan yang terjadi di dalam eksternal dan internal organisasi.

Perubahan eksternal misalnya terkait dengan pemerintah (perubahan politik dan ekonomi). Sedangkan, aspek internal misalnya perubahan kebijakan manajemen yang berpengaruh terhadap karyawan. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi dan harapan antara organisasi dan stakeholders.

Coombs dalam *Ongoing Crisis Communication* (2007:42) selanjutnya menjelaskan bahwa perbedaan persepsi dan harapan yang dibiarkan berpotensi menimbulkan perlawanan stakeholders, salah satunya dengan menyebarkan publikasi negatif tentang organisasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu mempunyai daya legitimasi ketika isu tersebut menyita perhatian publik. Menurut Sastropetro dalam *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial* (1990:49) istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari sejumlah orang. Berbeda dengan kerumunan, publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan.

Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti pembicaraan-pembicaraan pribadi yang berantai, melalui desas-desus, melalui surat kabar, radio, televisi dan film.

Alat-alat penghubung ini memungkinkan “publik” mempunyai pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya. Publik dapat dimaknai sebagai sejumlah orang yang mempunyai minat, kepentingan, atau kegemaran yang sama.

Opini publik, menurut William Albiq dalam Sastropetro (1990:52) adalah suatu jumlah dari pendapat individu-individu yang diperoleh melalui perdebatan dan opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik.

Menurut Leonard W. Doob dalam Sastropetro (1990:71), opini publik mempunyai hubungan yang erat dengan sikap manusia, yaitu sikap pribadi atau sikap kelompok. Doob selanjutnya mengatakan bahwa opini publik adalah sikap pribadi seseorang ataupun sikap kelompok, maka sebagian sikapnya ditentukan pengalaman dari dan dalam kelompoknya.

Dalam buku *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial* (Sastropetro, 1990:41) dibahas persamaan opini antara William McDougall dengan Otto

Friedman yang berpendapat antara opini publik serta sikap pribadi manusia ada hubungan yang erat; pengalaman pribadi menentukan sikap serta tergantung pada pengalaman masyarakatnya sendiri tentang apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah.

Dalam rangka ini orang menentukan sikapnya serta membentuk opininya bila menghadapi suatu persoalan, sehingga sikap membentuk opini publik. Persamaan opini harus dinyatakan untuk dapat di nilai sebagai opini publik. Doob menyebutnya sebagai opini yang telah dinyatakan: actual (public) opinion. Suatu opini harus dinyatakan sebelum dapat dinilai, karena sesuatu yang belum dinyatakan dan belum disampaikan, belum mengalami proses komunikasi dan dengan demikian masih merupakan suatu proses dalam diri manusia yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Opini publik penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan atau instansi termasuk instansi pemerintahan, karena dengan mengetahui opini yang terbentuk di masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya dan memengaruhi kebijakan sebuah pemerintahan.

Opini publik merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh sekelompok orang yang mempunyai beberapa kesamaan. Keputusan tersebut dapat berupa persepsi, tindakan, dan sikap positif atau negatif terhadap sebuah isu. Opini publik tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya penyebaran isu melalui sebuah media. Media yang saat ini banyak digunakan ialah media sosial dengan memanfaatkan jejaring internet.

#### **Menurut para ahli adalah sebagai berikut :**

Opini menurut **Webster's New Collegiate Dictionary** adalah suatu pandangan, keputusan atau taksiran yang terbentuk di dalam pikiran mengenai suatu persoalan tertentu. □

Menurut **Frazier Moore** (2004) Opini lebih kuat dari pada sebuah kesan tetapi lebih lemah dari pada pengetahuan yang positif. Opini merupakan suatu kesimpulan yang ada dalam pikiran dan belum dikeluarkan untuk di perdebatkan.

**William Albig** (1939:4) menjelaskan sebagai berikut mengenai opini : Opinion is any expression on a controversial topic.

**Abelson dalam Soemirat** (2004) menyebutkan Opini mempunyai unsur pembentuk yaitu

1. Belief

---

<sup>4</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/6431/2/KOM104133.pdf> akses pada pukul 10.33 WIB Tanggal 09 September 2021

2. Attitude
3. Perception

Karakteristik Opini Publik Opini publik adalah pengumpulan citra yang diciptakan oleh proses komunikasi. Gambaran tentang sesuatu akan menimbulkan banyak tafsir para peserta komunikasi. Rudi Panuju (dalam Ollie, 2011: 18) menegaskan pergeseran yang terjadi dalam opini publik disebabkan oleh beberapa faktor:

**1. Faktor Psikologis** Tidak ada kesamaan antara individu yang satu dengan lainnya, yang ada hanya kemiripan yang memiliki banyak perbedaan. Perbedaan antar individu berbeda bentuk dan cara merepon stimulus atau rangsangan yang menghampirinya. Perbedaan faktor psikologis menyebabkan pemaknaan terhadap kenyataan yang sama bisa menghasilkan penyandian yang berbeda-beda.

**2. Faktor Sosiologi Politik**

- a. Opini publik menunjukkan citra superioritas
- b. Opini publik menunjukkan keikutsertaan individu ke kejadian tertentu
- c. Opini publik berhubungan dengan citra, rencana, dan operasi (action)
- d. Opini publik sesuai dengan kemauan orang banyak
- e. Opini publik identik dengan hegemoni ideology

**3. Faktor Budaya Budaya** adalah seperangkat nilai yang digunakan mengelola, memelihara hidupnya, menjaga dari gangguan internal maupun eksternal, dan mengembangkan kehidupan manusia. Nilai-nilai yang terhimpun dalam sitem budaya itu oleh individu dijadikan identitas sosialnya atau dijadikan ciri-ciri keanggotaannya dikomunitas budaya tertentu.

**4. Faktor Media Massa** Interaksi antara media dan institusi masyarakat menghasilkan produk berupa isi media (media content).

Oleh audience, isi media diubah menjadi gugusan-gugusan makna. Apakah yang dihasilkan dari proses penyandian pesan itu ditentukan oleh norma yang berlaku dalam masyarakatnya, pengalaman individu yang lalu, kepribadian individu, dan selektivitas penafsiran.

### **Ciri-ciri Opini Publik**

Astrid 1975 (dalam Ollie, 2011: 23) menyatakan opini publik bersifat umum dan disampaikan oleh kelompok sosial secara kolektif dan tidak permanen. Istilah “publik” mengacu ke kelompok manusia yang berkumpul secara spontan dengan syarat-syarat :

1. Menghadapi persoalan tertentu
2. Berbeda opini mengenai persoalan tertentu dan berusaha mengatasinya
3. Mencari jalan keluar melalui diskusi karena setiap publik memiliki persoalan yang menuntut perhatian maka dengan sendirinya terbentuk banyak publik.

### **Faktor Pemicu Timbulnya Opini Publik**

Bernard Hennesy 1990 (dalam Ollie, 2011: 22) mengemukakan lima faktor munculnya pendapat umum (opini publik):

1. Ada isu (presence of an issue). Harus terdapat konsensus yang sesungguhnya, opini publik berkumpul disekitar isu tertentu. Isu dapat didefinisikan sebagai situasi kontemporer yang mungkin tidak terdapat kesepakatan. Paling tidak ada unsure kontroversi terkandung didalamnya dan isu mengandung konflik kontemporer.
2. Ciri publik (nature of publik). Harus ada kelompok yang dikenal dan berkepentingan dengan persoalan itu.
3. Pilihan yang sulit (complex of preferences).

Faktor ini mengacu ke totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu.

4. Pernyataan opini (expression of preferences). Berbagai pernyataan bertumpuk disekitar isu tertentu. Pernyataan biasanya disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan atau dicetak dan sewaktu-waktu melalui gerakgerik, kepalan tinju, lambaian tangan dan tarikan napas panjang.
5. Jumlah orang yang terlibat (number of persons involved).

Opini publik mensyaratkan besarnya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu tertentu.

### **Fungsi Opini Publik**

Selain berfungsi kekuatan dalam kehidupan bernegara opini publik juga mempunyai fungsi dalam kehidupan sosial dan individu. Sola (dalam Arifin, 2011: 22) opini publik memiliki tiga fungsi bagi seseorang yaitu :

- a. The cognitive function Berarti opini publik memberikan pengertian. Dengan adanya pengertian itu seseorang dapat objektif dalam menanggapi persoalan atau masalah yang merebak dalam masyarakat. Fungsi itu penting karena individu sebagai manusia seringkali diliputi dan dikuasai oleh sifat curiga dan langsung memberi vonis sebelum memahami betul suatu masalah.
- b. The identification function Berarti opini publik berfungsi memperkenalkan pendapat-pendapat yang merupakan kesepakatan kelompok dan individu-individu anggotanya. Hal itu dilakukan karena individu cenderung untuk berbuat sama dengan yang dilakukan oleh kelompoknya.<sup>5</sup>

Peneliti menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan opini publik tentang pemilu 2024 seperti yang dilakukan oleh seluruh warga Jakarta Pusat. Seluruh Warga Jakarta Pusat bisa mengetahui perkembangan PEMILU 2024 dalam pesta demokrasi rakyat untuk memilih PILPRES, PILEG & PILKADA serentak pada tahun 2024 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesta demokrasi rakyat Indonesia diselenggarakan setiap 5 tahunan sekali yang dimana berasal dari rakyat, untuk rakyat dan kembali kerakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya melalui pesta demokrasi rakyat Indonesia.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024).

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berusaha mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dari Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024).

### **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khasanah berpikir disipin ilmu Komunikasi konsentrasi Komunikasi Industri Media,

---

<sup>5</sup> <http://repository.uir.ac.id/786/2/bab2.pdf> akses pada pukul 12.42 WIB Tanggal 09 September 2021

khususnya yang berkaitan dengan Analisis Robert J.Schreiter, Opini Publik, Demokrasi, Politik, Warga.

### **Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat luas terkait dengan Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Analisis Robert J.Schreiter**

Analisis berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Dalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya saja cara dan metode analisisnya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah.

Menurut Robert J. Schreiter (1991) mengatakan analisa merupakan membaca teks, dengan

menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.

Menurut nana sudjana (2016:27) “ Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya “. Menurut Abdul Majid (2013:54) “ Analisis adalah (kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilah dan mengenai perbedaan ( diantara beberapa yang dalam satu kesatuan)”.<sup>6</sup>

Teori Analisis yang dijelaskan oleh Robert J.Schreiter ini masuk kedalam kategori sosialkultural sosiokultural yang fokus pada proses pemaknaan dan penafsiran yang dilakukan bersama yang terbentuk dalam jaringan dan implikasi susunannya dalam kehidupan masyarakat.

Peneliti menganggap teori analisis ini sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024).

## **2.2 Opini Publik**

Istilah opinion yang diterjemahkan menjadi “opini” didefinisikan oleh Cutlip dan Center diartikan sebagai pengekspresian suatu sikap mengenai persoalan yang mengandung pertentangan. Opini juga diartikan sebagai pendapat atau pandangan tentang suatu persoalan.

Opini juga diartikan sebagai pendapat atau pandangan tentang suatu persoalan.<sup>7</sup>

Opini merupakan kata yang berarti tanggapan atau jawaban terhadap sesuatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata, bisa juga berupa perilaku, sikap, tindakan, pandangan, dan tanggapan. Sedangkan pendapat lain mengatakan opini adalah ekspresi sikap dengan melalui jawaban positif untuk informan yang mendukung, jawaban netral dan negatif untuk jawaban yang tidak mendukung, artinya apabila seseorang beropini positif tandanya orang tersebut mendukung, dan apabila seseorang beropini negatif artinya orang tersebut menolak.

Opini menurut Cutlip dan center adalah pernyataan tentang sikap mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial (dalam Olli dan Erlita, 2011: 39). Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat berbeda-beda.

---

<sup>6</sup> <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/490/4/BAB%20II.pdf> akses pada pukul 11.50 WIB tanggal 12 Agustus 2021

<sup>7</sup> Abdullah,2001 Press Relation,Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.14



Opini adalah serapan dari bahasa asing (opinion). Merupakan tanggapan atau jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata (intangible), baik dalam bentuk opini tertulis maupun lisan. Bisa juga sebagai perilaku, sikap tindak, pandangan dan tanggapan dan lain sebagainya.

Opini dapat dinyatakan secara aktif dan pasif, verbal (lisan) dan baik secara terbuka dengan melalui ungkapan kata-kata yang dapat ditafsirkan dengan jelas, maupun melalui pilihan kata yang halus atau diungkapkan secara tidak langsung, dan dapat diartikan secara konotatif atau persepsi (personal). Opini dapat dinyatakan melalui perilaku, sikap tindak, mimik muka atau bahasa tubuh (body language) atau berbentuk simbol-simbol tertulis.

Menurut Soenarjo, dalam bukunya *Opini Publik*, opini publik dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan pendapat umum, dengan demikian public diterjemahkan dengan umum sedangkan opinion dialihbahasakan dengan pendapat. Dalam ilmu komunikasi terdapat istilah lain, yaitu *Public Relations* yang umumnya diterjemahkan dengan *Hubungan Masyarakat*. Dalam hal ini public diterjemahkan dengan masyarakat, sedangkan relations (sebenarnya kata jamak) diterjemahkan dengan hubungan (1984:22).

Opini menurut Cutlip dan center adalah pernyataan tentang sikap mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial (dalam Olli dan Erlita, 2011: 39). Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat berbeda-beda. Opini adalah serapan dari bahasa asing (opinion).

Merupakan tanggapan atau jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata (intangible), baik dalam bentuk opini tertulis maupun lisan. Bisa juga sebagai perilaku, sikap tindak, pandangan dan tanggapan dan lain sebagainya.

Opini dapat dinyatakan secara aktif dan pasif, verbal (lisan) dan baik secara terbuka dengan melalui ungkapan kata-kata yang dapat ditafsirkan dengan jelas, maupun melalui pilihan kata yang halus atau diungkapkan secara tidak langsung, dan dapat diartikan secara konotatif atau persepsi (personal). Opini dapat dinyatakan melalui perilaku, sikap tindak, mimik muka atau bahasa tubuh (body language) atau berbentuk simbol-simbol tertulis.

Noelle-Neumann mendefinisikan opini publik adalah sikap atau tingkah laku yang ditunjukkan seseorang kepada khalayak jika ia tidak ingin dirinya terisolasi; dalam hal

kontroversial, opini publik adalah sikap yang ditunjukkan seseorang kepada khalayak tanpa harus membahayakan dirinya sendiri yaitu berupa pengucilan (dalam Morissan, 2008: 72).

Untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan publik harus diberi penerangan-penerangan yang lengkap dan objektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian daripadanya. Selain dari pendapat-pendapat dan saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai.<sup>8</sup>

Menurut Emory Begardus opini publik adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan didalam masyarakat demokratis. Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan, dengan demikian berarti:

- a. Opini publik itu bukan merupakan kata sepakat (senstemimig, unanimous)
- b. Tidak merupakan jumlah pendapat yang dihitung secara “numerical” yakni berapa jumlah orang terdapat dimasing-masing pihak, sehingga mayoritas opini dapat disebut opini publik.
- c. Opini publik hanya dapat berkembang dinegara-negara demokratis dimana terdapat kebebasan bagi tiap individu untuk menyatakan pendapatnya dengan lisan, tertulis, gambar-gambar, isyarat dan lambang-lambang lainnya yang dapat dimengerti (dalam Abdurrachman, 2001: 51-52). Kebebasan menyatakan opini pengembangannya dimasyarakat tidak akan lepas dari sistem pers yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Negara-negara demokratis terdapat “freedom of the pers”, sehingga opini yang dinyatakan publik dapat dikembangkan atau disebarluaskan dengan melalui pers (termasuk radio, film dan televisi bahkan fotografi). William Albigh mengemukakan bahwa opini publik adalah hasil dari interaksi antara individu-individu dalam kelompok apa saja. Ini berarti bahwa opini publik itu timbul karena adanya interaksi antara individu-individu yang menyatakan pendapatnya (dalam Abdurrachman, 2001: 51).

### **Tahap-tahap Pembentukan Opini**

---

<sup>8</sup> <http://repository.uir.ac.id/786/2/bab2.pdf> akses pada pukul 13.33 WIB Tanggal 09 September 2021

Asal mula pembentukan opini terletak dalam sebuah persoalan yang menimbulkan perselisihan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi isu yang akan menangkap perhatian orang banyak. Sebenarnya setiap orang memiliki keluhan dan harapan yang banyak menimbulkan perselisihan. Akan tetapi, seperti yang dikemukakan Davison, "suatu isu mulai berakar hanya jika dikomunikasikan dari satu orang ke orang kedua, yang kemudian dilanjutkan dalam percakapan sendiri".<sup>9</sup>

Suatu isu menjadi umum jika permasalahannya menyebabkan dampak negatif kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Tahap pertama publikasi sebuah layanan ialah munculnya emoticon pada media sosial yang memiliki potensi menjadi isu. Yang kedua ialah emoticon yang muncul pada media sosial tersebut menggambarkan sebuah budaya pada golongan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Hal tersebut merangsang komunikasi melalui saluran massa, interpersonal, dan organisasi, maka terbukalah fase ketiga yakni pembentukan sebuah opini.

Jenis-jenis Opini Publik Perilaku seseorang dengan sikapnya sangat erat kaitannya. Artinya perilaku seseorang yang banyak memiliki pengaruh dari kehidupan sehari-hari.

Menurut Effendy, untuk memperoleh kejelasan mengenai opini publik perlu dikemukakan tentang jenis-jenis opini lainnya yang berkaitan dengan opini publik :

1. Opini Individu Opini individu merupakan pendapat seseorang secara perorangan mengenai sesuatu yang terjadi dimasyarakat. Pendapat itu bisa setuju atau tidak setuju.
2. Opini Pribadi Merupakan pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial. Pendapat seseorang belum tentu merupakan opininya pribadi, mungkin ia ambil alih opini orang lain disebabkan ia menyetujuinya. Lalu dalam suatu pergunjungan dikomunikasikannya kepada orang lain sebagai opininya sendiri tetapi bukan opininya pribadinya.
3. Opini Kelompok Pendapat kelompok mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang termasuk sekelompok orang tadi.
4. Opini Mayoritas Pendapat orang-orang terbanyak dari mereka yang berkaitan dengan suatu masalah yang pro atau kontra. Mungkin yang punya penilaian lain.

---

<sup>9</sup> Dan Nimmo, 2001, Komunikasi Politik; khalayak dan efek, Bandung, Rosdakarya hlm.20

Biasanya berada disuatu forum terbuka dalam bentuk lembaga, misalnya parlemen sehingga bisa dihitung berapa jumlah yang pro dan kontra.

5. Opini Minoritas Kebalikan dari opini mayoritas. Opini minoritas adalah pendapat orang-orang relative dalam jumlahnya sedikit dibandingkan jumlah mereka terkait dengan suatu masalah sosial.

6. Opini Massa Merupakan tahap kelanjutan dari opini publik. Opini yang bersifat massa ini beralih bentuk menjadi tindakan fisik.

7. Opini Umum Pendapat umum merupakan pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum (dalam Soemirat dan Ardianto, 2012: 107-108).

### **Karakteristik Opini Publik**

Opini publik adalah pengumpulan citra yang diciptakan oleh proses komunikasi. Gambaran tentang sesuatu akan menimbulkan banyak tafsir para peserta komunikasi. Rudi Panuju (dalam Olli, 2011: 18) menegaskan pergeseran yang terjadi dalam opini publik disebabkan oleh beberapa faktor:

1. **Faktor Psikologis** Tidak ada kesamaan antara individu yang satu dengan lainnya, yang ada hanya kemiripan yang memiliki banyak perbedaan. Perbedaan antar individu berbeda bentuk dan cara merepon stimulus atau rangsangan yang menghampirinya. Perbedaan faktor psikologis menyebabkan pemaknaan terhadap kenyataan yang sama bisa menghasilkan penyandian yang berbeda-beda.

### **2. Faktor Sosiologi Politik**

- a. Opini publik menunjukkan citra superioritas
- b. Opini publik menunjukkan keikutsertaan individu ke kejadian tertentu
- c. Opini publik berhubungan dengan citra, rencana, dan operasi (action)
- d. Opini publik sesuai dengan kemauan orang banyak
- e. Opini publik identik dengan hegemoni ideology

### **3. Faktor Budaya**

Budaya adalah seperangkat nilai yang digunakan mengelola, memelihara hidupnya, menjaga dari gangguan internal maupun eksternal, dan mengembangkan kehidupan manusia. Nilai-nilai yang

terhimpun dalam sitem budaya itu oleh individu dijadikan identitas sosialnya atau dijadikan ciri-ciri keanggotaannya dikomunitas budaya tertentu.

**4. Faktor Media Massa** Interaksi antara media dan institusi masyarakat menghasilkan produk berupa isi media (media content). Oleh audience, isi media diubah menjadi gugusan-gugusan makna. Apakah yang dihasilkan dari proses penyandian pesan itu ditentukan oleh norma yang berlaku dalam masyarakatnya, pengalaman individu yang lalu, kepribadian individu, dan selektivitas penafsiran.

Faktor Pemicu Timbulnya Opini Publik Bernard Hennesy 1990 (dalam Olih, 2011: 22) mengemukakan lima faktor munculnya pendapat umum (opini publik):

1. Ada isu (presence of an issue). Harus terdapat konsensus yang sesungguhnya, opini publik berkumpul disekitar isu tertentu. Isu dapat didefenisikan sebagai situasi kontemporer yang mungkin tidak terdapat kesepakatan. Paling tidak ada unsure kontroversi terkandung didalamnya dan isu mengandung konflik kontemporer.
2. Ciri publik (nature of publik). Harus ada kelompok yang dikenal dan berkepentingan dengan persoalan itu.
3. Pilihan yang sulit (complex of prefences). Faktor ini mengacu ke totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu.
4. Pernyataan opini (expression of prefences). Berbagai pernyataan bertumpuk disekitar isu tertentu. Pernyataan biasanya disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan atau dicetak dan sewaktu-waktu melalui gerakgerak, kepalan tinju, lambaian tangan dan tarikan napas panjang.
5. Jumlah orang yang terlibat (number of persons involved). Opini publik mensyaratkan besarnya msayarakat yang menaruh perhatian terhadap isu tertentu

### **2.3 Politik**

Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state).<sup>10</sup> Dalam negarakota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.<sup>11</sup> Politik yang berkembang di

<sup>10</sup> Hidajat Imam. 2009. Teori-Teori politik. Malang: Setara press. Hlm 2

<sup>11</sup> Basri Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hlm 2.

Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik. Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>12</sup>

Politik adalah suatu fenomena yang sangat berhubungan dengan kehidupan manusia yang merupakan makhluk sosial.

Secara etimologis, kata “politik” berasal dari bahasa Belanda “politiek” dan bahasa Inggris “politics” di mana keduanya bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά “Politika” yang artinya adalah dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara.

Dalam bahasa Yunani, kata τα πολιτικά “Politika” merupakan berasal dari dua kata, yaitu πολίτης polites yang artinya warga negara dan πόλις polis yang artinya negara kota. politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara mencapai tujuan.

Agar kita dapat lebih memahami politik, maka kita perlu memahami beberapa kata kunci berikut ini:

- Kekuasaan politik.
- Legitimasi.
- Sistem politik.
- Perilaku politik.

---

<sup>12</sup> Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 16.

- Partisipasi politik.
- Proses politik.
- Partai politik.

Definisi politik, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini:

1. Andrew Heywood

Menurut Andrew Heywood, pengertian politik adalah kegiatan suatu negara yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, serta mengamandemen semua peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang artinya tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

2. Roger F. Soltau

Menurut Roger F. Soltau, pengertian politik adalah ilmu yang mempelajari tentang Negara, tujuan-tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut dan hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta Negara lain.

3. Miriam Budiardjo

Menurut Miriam Budiardjo, definisi politik adalah berbagai kegiatan dari suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem indonesia dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

4. Sri Sumantri

Menurut Sri Sumantri, arti politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam berbagai badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Tujuan politik pada umumnya:

- Untuk mengupayakan agar kekuasaan di masyarakat dan pemerintahan dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
- Untuk mengupayakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengelola, dan menerapkan demokrasi secara keseluruhan.
- Untuk mengupayakan penerapan dan pengelolaan politik di masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kerangka mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Politik adalah suatu seni dan ilmu untuk memperoleh kekuasaan, baik secara constitutional maupun unconstitutional. Politik tidak hanya ada dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat secara umum. Misalnya, struktur masyarakat, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi, semuanya merupakan bagian dari politik.<sup>13</sup>

#### 2.4 Demokrasi

Demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/ kratein berarti kekuasaan/berkuasa).<sup>15</sup>

Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>16</sup>

Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu:

- (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;

---

<sup>13</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-politik.html> Akses pada pukul 13.33WIB Tanggal 17 September 2021

<sup>14</sup> Untuk kepentingan pemahaman secara komprehensif terhadap istilah-istilah demokrasi tersebut, baca lebih lanjut: Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, 1988 Ilmu Negara, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 167 – 191.

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, 1996, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, hlm. 50.

<sup>16</sup> Sidney Hook, 1980 dalam Nakamura dan Samallowood, The Politics of Policy Implementation, st. Martin's Press, New York, hlm. 67.

<sup>17</sup> Deliar Noer, 1983 Pengantar ke Pemikiran Politik, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 207



(2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif,

(3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis,

(4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan

(5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religious, legitimasi ideologis eliter, atau legitimasi pragmatis.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Afan Gaffar, 2005 Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>19</sup> Frans Magnis Suseno, 1999 Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 30 – 66.

Namun, kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut, dengan sendirinya, mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi tersebut akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara.

Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.

## 2.4 Warga

Orang yang disebut warga negara bisa berupa warga lokal atau warga negara asing di sebuah negara. Secara umum, ada asas kewarganegaraan yang digunakan untuk menentukan warga negara seseorang.<sup>20</sup>

Secara etimologis warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata "civis" atau "civitas" yang berarti anggota warga dari city-state. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan "citoyen" yang bermakna warga dalam "cite" (kota yang memiliki hak-hak terbatas).

Istilah warga negara sendiri merupakan terjemahan kata citizen (Inggris) yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesama penduduk dan orang setanah air. Berdasarkan arti dalam bahasa Inggris, **warga negara** adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri.

Sementara itu, dikutip dari buku "**Pendidikan Kewarganegaraan**" oleh **Maryanto**, berikut beberapa definisi warga negara menurut beberapa ahli.

### 1. A.S. Hikam

---

<sup>20</sup><https://www.bola.com/ragam/read/4412413/pengertian-warga-negara-ketahui-fungsi-beserta-hak-dan-kewajibannya> akses pada pukul 15.05 WIB Tanggal 09 September 2021

Mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari "citizenship", yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Mendefinisikan warga negara dengan anggota negara.

## **2. Koerniatmanto S.**

Sebagai anggota negara, seorang warga negara memiliki kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.

## **3. Austin Ranney**

Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara.

## **4. Menurut Stanley E. Ptnord dan Etner F.Peliger**

Arti warga negara didefinisikan sebagai kajian yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan, hak, dan kewajiban warga negara.

## **5. UU No. 62 Tahun 1958**

Menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Apa beda warga negara dengan rakyat dan penduduk? Rakyat memiliki definisi dalam konsep politis dan diartikan sebagai orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan serta tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya berlawanan dengan penguasa.

Sementara penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.

## **Perbedaan Warga Negara dan Bukan (non) Warga Negara**

Jika dilihat dari hubungannya dengan kekuasaan pemerintah negara, seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara <https://www.detik.com/tag/warga-negara-indonesia> dan bukan (non) warga negara karena alasan-alasan berikut:

1. Seseorang disebut warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing.

2. Seseorang disebut bukan (non) warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintah negara lain. Misalnya, duta besar.

### **Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Diantara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah Hak Asasi Manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan kedua yakni sebagai berikut.

#### **1. Hak Warga Negara Indonesia**

- kesamaan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
- Ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000)
- Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1, perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2000)
- Kesejahteraan sosial (pasal 33 ayat 1,2 dan pasal 34)

#### **2. Kewajiban warga negara Indonesia**

- Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
- Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000)
- Setia membayar pajak negara (pasal 23A perubahan ketiga tanggal 10 november 2001)
- Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30 ayat 1 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5624985/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya> akses pada pukul 14.59 WIB Tanggal 09 September 2021

### **Fungsi Warga Negara**

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan yang sah dan berdaulat.
2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kapasitas dan bidang masing-masing.
3. Menghormati hak asasi manusia (HAM) orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Tunduk kepada peraturan dan batasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
5. Menjaga persatuan dan kesatuan negara.
6. Mentaati dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali.
7. Turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa.<sup>22</sup>

### **BAB III**

---

<sup>22</sup><https://www.bola.com/ragam/read/4412413/pengertian-warga-negara-ketahui-fungsi-beserta-hak-dan-kewajibannya> akses pada pukul 16.00 WIB Tanggal 09 September 2021

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma (*paradigm*) dapat di definisikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang. Ada yang menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya.

Namun secara umum paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat kekayaan atau keyakinan dasar yang menuntut seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini sejalan dengan Guba yang dikonsepsikan oleh Thomas Kuhn sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun penyelidikan ilmiah.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan paradigm post-positivis dimana paradigm post-positivis berkeinginan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan positivism. Secara ontologis, cara pandang aliran ini bersifat critical realism. Sebagaimana cara pandang kaum realis, aliran ini juga melihat realitas sebagai hal yang memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, namun menurut aliran ini adalah mustahil bagi manusia (peneliti) untuk melihat realias secara benar.

Secara epistemologis hubungan manusia antara periset dan obyek yang diteliti tidak dipisahkan. Suatu kebenaran tidak mungkin bisa ditangkap apabila periset berada dibelakang layar, tanpa terlibat dengan obyeknya secara langsung.<sup>24</sup>

Menurut Guba menyebutkan bahwa post-positivisme sebagai paradigma / aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivism yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap obyek yang di teliti. Secara ontologi aliran ini bersifat critical realism yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat di lihat secara benar oleh

---

<sup>23</sup> Agus Salim, 2001 *Teori dan paradigma Penelitian Sosial*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal 33

<sup>24</sup> Agus Salim, 2006 *Teori Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal 10

manusia(peneliti). Oleh karena itu secara metodologi pendekatan eksperimental melalui metode triangulation yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti dan teori.

Selanjutnya di jelaskan secara epistemologi hubungan antara pengamat atau peneliti dengan obyek atau realitas yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan, tidak seperti yang diusulkan aliran positivism. Aliran ini menyatakan suatu hal yang tida mungkin mencapai atau melihat kebenaran apabila pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat langsung. Oleh karena itu, hubungan antara peneliti dengan obyek harus bersifat interaktif, dengan catatan bahwa peneliti harus bersifat se-netral mungkin, sehingga tingkat subyektivitas dapat dikurangi secara minimal.

Penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan paradigma post-positivisme cara pandang aliran ini bersifat *critical realism*. Sebagaimana cara pandang kaum realis, aliran ini juga melihat realitas sebagai hal yang memang ada dalam kenyataan sesuai hukum alam. Peneliti menggunakan paradigma post-positivisme untuk meneliti Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Analisis. Menurut Robert J. Schreiter analisa merupakan membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan serta focus penelitiannya terletak pada Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024).

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan paradig post-positivis di mana paradig post-positivis berkeinginan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan positivism.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan paradigma post-positivisme cara pandang aliran ini bersifat *critical realism*. Sebagaimana cara pandang kaum realis, aliran ini juga melihat realitas sebagai hal yang memang ada dalam kenyataan sesuai hukum alam. Peneliti menggunakan paradigma post-positivisme untuk meneliti. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Analisis. Menurut Robert J. Schreiter analisa merupakan membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan serta focus penelitiannya terletak pada Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024).

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah<sup>25</sup> cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

#### **Data Primer**

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan data primer. Menurut Rachmat Kriyantono "Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama." Rachmat Kriyantono. Melalui penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung, wawancara mendalam dengan narasumber, serta mencatat kegiatan yang berlangsung.

Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

#### **Observasi Langsung.**

Menurut Ruslan Rosady . Observation yaitu :

Peneliti melakukan observasi dengan cara melibatkan diri atau menjadi bagian lingkungan sosial (organisasi) tengah diamati melalui teknik partisipasi dapat memperoleh data relatif lebih akurat dan lebih banyak. Karena peneliti dan kejadian atau peristiwa dalam lingkungan sosial tertentu. Penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan terhadap informan, serta studi literatur.

Teknik wawancara mendalam dipilih karena topik tentang rasisme bersifat sensitif. Dengan melakukan wawancara berdua saja dengan informan, diharapkan informan dapat lebih terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai topik tersebut. Selain itu maksud dari wawancara

---

<sup>25</sup> Rachmat, Kriyantono. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 43



dan pengamatan ini adalah agar penulis dapat masuk kedalam perspektif informan, dan mengetahui apa yang ada di pikiran informan.

Tipe panduan wawancara yang akan digunakan adalah *the intetiew guide*, yaitu men-list topik - topik pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para informan walau topik - topik baru mungkin saja muncul saat wawancara sedang berlangsung. Tipe wawancara ini dapat membuat jalannya wawancara menjadi lebih terstruktur.

### **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, data atau informasi yang telah ada sebelumnya, bukan secara langsung, misalnya dengan mempelajari sumber bacaan, dokumen perusahaan, media massa, media *online* yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Peneliti dapat memahami data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh melalui buku-buku dan literature yang dapat di jadikan refinisi untuk mengetahui teori-teori yang diperlukan agar dapat mendukung serta dapat melakukan data penulisan ini.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan berupa informasi. Metode wawancara, peneliti bertanya kepada informan yang berhubungan dengan peneliti ini. Setelah data terkumpul, hasil wawancara dipilah-pilah dan dianalisis. Dari hasil analisis tersebut peneliti akan mendapatkan suatu jawaban dari peneliti ini.

### **Validitas dan Otentitas Data**

Hasil yang di dapat dalam penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, diperlukannya pengecekan data agar informasi yang disajikan tersebut adalah valid. Maka dari itu dibutuhkannya teknik validitas dan otentitas data. Menurut Wiliam Wiersma, *triangulation is qualitative cross validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data*

*sources or multiple data collection procedures*<sup>26</sup>. Artinya triangulasi adalah penelitian kualitatif lintas validasi. Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data pada studi kasus yang ditentukan oleh peneliti Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024).

## **BAB IV**

### **Hasil,Pembahasan,Saran & Kritik**

#### **4.1 Hasilnya**

Berdasarkan peneliti hasil wawancara mendalam bersama warga Jakarta Pusat mengenai PEMILU 2024 dengan analisis dari konteks komunikasi politik, politik dan pengamatan menurut opini warga Jakarta Pusat yang masuk dalam program wawancara ini adalah Pada tahun 2024,PEMILU,PILEG & PILKADA serentak Negara Kesatuan Republik Indonesia Partai Politik yang masih mendominasi sebagai pemenangnya, masih dipercaya oleh Rakyat, mendengarkan suara aspirasi rakyat Indonesia dimana pun berada, mementingkan rakyat, partai yang mendukung pro rakyat, sudah terbukti, terlihat kinerjanya terlihat,tingkat kepuasaannya sangat puas hasil kerjanya, menepati janji, mensejahterakan rakyat, bebas korupsi, sungguh membela rakyat, mewakili suara hati rakyat, partai politik wong cilik, mengedepankan urusan rakyatnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kemudian di susul Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Perindo, PKS dan golput masih sering terjadi dan menemukan.dalam kehidupan.

Karena PDIP sudah terbukti hasil kinerjanya yang baik, pro dengan rakyat, partainya wong cilik, meyakinkan, bisa membangun dan kerja nyata, terbukti kinerjanya, memuaskan segalanya untuk membangun Indonesia Maju, Religius, Baik & Bersih dalam penyelenggara negara Republik Indonesia, Pemeritahan Terbuka Digital (Open Gov Digital) yang dimana akuntabel,transparansi & professional menyongsong Indonesia Emas 2045.

---

<sup>26</sup> Ibid. Hal: 273

PDIP pada PEMILU, PILEG & PILKADA 2024 mendatang sebagai pemenang kembali duduk didalam Pemerintahan seluruh Indonesia mulai dari Kotamadya, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional dari Sabang hingga Merauke karena dapat terlihat oleh rakyat secara transparan hasil kinerja kerjanya dalam Kabinet Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo memuaskan, mementingkan rakyat, pro dengan rakyat, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, mewakili suara hati rakyat, partai politik wong cilik, mendengar dan menyerap aspirasi rakyat Indonesia, sungguh-sungguh membela rakyat untuk membangun Indonesia Maju, Adil & Makmur Pemerintahan Terbuka Digital (Open Gov Digital) Akuntabel, Transparansi & Profesional, Baik & Bersih dalam penyelenggara negara Republik Indonesia, Menyongsong Indonesia Emas 2045.

Harapannya dari aspirasi rakyat, Calon Anggota Legislatif untuk memenangkan dalam memperebut kursi kekuasaan baik di DPRD Kotamadya, Kabupaten, Provinsi, Hingga DPR RI, DPD RI, MPR RI harus jujur, amanah, wibawa, merakyat, bertanggung jawab dunia akhirat dan membangun Indonesia lebih maju, menyongsong Indonesia Emas 2045, bersungguh sungguh mendengarkan suara rakyat apa yang masyarakat bilang, memilih yang benar-benar bisa membawa Indonesia Maju, kinerja dalam menjalankan tugasnya memuaskan, terbukti dan baik, berjuang dengan rakyat, mendidik rakyat, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat, buang janji palsu, meningkatkan perekonomian Indonesia dan melihat rakyat yang dipulau terpencil, memiliki integritas, merakyat dan mengedepankan dialog, makmur, sejahtera, lancar, harga kebutuhan pokok tidak naik, berwibawa dan cerdas, Bisa menjadikan rakyatnya hidup makmur sentosa dan mohon diperhatikan kembali kesadaran rakyatnya, agar negara kita lebih baik dan lebih maju, bisa membantu bagi rakyat yang di pelosok negeri yang jauh dari keramaian, agar bisa lebih diperhatikan lagi bagi rakyatnya yang tidak mampu dan miskin, akuntabel, transparansi dan profesional, bijaksana, jangan omong doang (buktikan), supaya lebih baik lagi, yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan partainya apalagi golongannya, memilih parpol dan caleg yang bisa melayakkan seluruh masyarakat Indonesia selayak-layaknya, cinta NKRI.

Visi MISI, Program pro rakyat Pancasila, kadernya bisa merasakan penderitaan rakyat di indikasi dari kegiatan mereka sehari-hari, disenangi oleh rakyat, pemimpin yang selalu me nomor satukan rakyatnya, intinya mendengar hati nurani rakyat, partisipasi warga untuk memilih berharap memajukan dan melahirkan pemimpin rakyat yang lebih baik, Ingin Indonesia lebih baik dan maju,

adil, pro bersama rakyat, berjiwa sosial tinggi, merangkulnya, visi misi dengan baik dapat memperjuangkan hak rakyat atas politik, kerja nyata, menjadi lebih baik lagi, menjalankan visi misi sesuai pro rakyat.

#### **4.2 Pembahasan**

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin.

Yakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara ajeg. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah.<sup>27</sup>

Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaknya “ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*)”.

Setiap lima tahunan Indonesia melakukan PEMILU yaitu PILPRES, PILEG & PILKADA, Namun kali ini PEMILU segera diselenggarakan pada Tahun 2024. PEMILU 2024 kali ini serentak dalam Pemilihan Umum PILKADA, PILEG & PILPRES. Pemilu 2024 dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia.

Peneliti melihat, mengamati dan wawancara berdasarkan dilapangan melakukan dialog bersama warga Jakarta Pusat perkembangan dari perpolitikan nasional Indonesia yang dimana PDIP masih dominasi, disukai, mendengar hati nurani keluh kesah rakyat, mendengar aspirasi rakyat, mengedepankan kepentingan rakyat hasil kinerjanya bagus dan baik serta menjadi pemenang PEMILU 2024.

### **4.3 Sarannya**

.1. Dalam memilih partai politik dan, memilih calon anggota legislative yang dipilih secara langsung oleh rakyat harus terbukti kinerja, team dan kualitas kerjanya yang sudah terbukti.

---

<sup>27</sup> <https://diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/> Akses Pada Pukul 11.42 WIB Tanggal 17 September 2021

2. PARPOL & Caleg, DLL harus mendengar hati nurani keluh kesah rakyat, adil, mendengar aspirasi rakyat, program pro rakyat.
3. PARPOL & Caleg jangan omong doing (buktikan) kinerja supaya lebih baik lagi supaya lebih baik lagi, yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan partainya apalagi golongannya.
4. Harapannya dari aspirasi rakyat, Calon Anggota Legislatif untuk memenangkan dalam memperebut kursi kekuasaan baik di DPRD Kotamadya, Kabupaten, Provinsi, Hingga DPR RI, DPD RI, MPR RI harus jujur, amanah, wibawa, merakyat, bertanggung jawab dunia akhirat dan membangun Indonesia lebih maju, menyongsong Indonesia Emas 2045, bersungguh sungguh mendengarkan suara rakyat apa yang masyarakat bilang, memilih yang benar-benar bisa membawa Indonesia Maju, kinerja dalam menjalankan tugasnya memuaskan, terbukti dan baik, berjuang dengan rakyat, mendidik rakyat, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat, buang janji palsu.
5. Mementingkan rakyat, pro dengan rakyat, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, mewakili suara hati rakyat, partai politik wong cilik, mendengar dan menyerap aspirasi rakyat

#### **4.3 Kritik**

1. Janji palsu, omong doang, mementingkan diri sendiri atau golongannya lebih baik di hilangkan saja untuk demi kepentingan rakyatnya.
2. Berjuang bersama rakyat, menepati janji, program pro rakyat.
3. Caleg, atau Calon Pimpinan yang mau maju pada PILEG, PILKADA & PILPRES nanti harus pro dengan rakyat, mendengar aspirasi rakyat, bukti kerja nyata, buang janji manis, prinsipnya kerja, kerja, kerja.
4. Harus mementingkan rakyat, tidak mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, mewakili rakyat.
5. Visi MISI, Program pro rakyat Pancasila, kadernya bisa merasakan penderitaan rakyat di indikasi dari kegiatan mereka sehari-hari, disenangi oleh rakyat, pemimpin yang selalu me nomor satukan rakyatnya, intinya mendengar hati nurani rakyat, partisipasi warga untuk memilih berharap memajukan dan melahirkan pemimpin rakyat yang lebih baik.
6. Hindari kepentingan partainya apalagi golongannya, lebih mengutamakan rakyat.

7. CALEG dll komunikasi publiknya dalam penyampaian pesannya baik dan mengedepankan dialog sebagai bentuk komunikasi efektif kepada rakyat.

8. Sungguh-sungguh membela rakyat untuk membangun Indonesia Maju, Adil & Makmur

### Daftar Pustaka

#### Buku Literasi

Abdullah, 2001 *Press Relation*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 14

Budiardjo, Miriam 1996, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, hlm. 50.

Hidajat Imam. 2009. *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press. Hlm 2

Gaffar, Afan 2005 *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

Hook, Sidney 1980 dalam Nakamura dan Samalwood, *The Politics of Policy Implementation*, st. Martin's Press, New York, hlm. 67.

Kriyantono, 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 43

Noer, Deliar 1983 *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 207

Nimmo, Dan 2001, *Komunikasi Politik; khalayak dan efek*, Bandung, Rosdakarya hlm. 20

Suseno, Frans Magnis 1999 *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 30 – 66.

Seta, Basri 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hlm 2.

Salim, Agus 2001 *Teori dan paradigma Penelitian Sosial*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal 33

Salim, Agus 2006 *Teori Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal 10

Untuk kepentingan pemahaman secara komprehensif terhadap istilah-istilah demokrasi tersebut, baca lebih lanjut: Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, 1988 *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 167 – 191.

**Website**

<http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Daerah-Khusus-Ibukota>

Jakarta\_12550\_p2kunkris.html#Sejarah akses pada pukul 09.36 WIB Tanggal 09 September 2021

[http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Daerah-Khusus-Ibukota-Jakarta\\_12550\\_p2k-](http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Daerah-Khusus-Ibukota-Jakarta_12550_p2k-)

unkris.html#Sejarah akses pada pukul 10.00 WIB Tanggal 09 September 2021

<http://repository.uir.ac.id/786/2/bab2.pdf> akses pada pukul 12.42 WIB Tanggal 09 September 2021

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/490/4/BAB%20II.pdf> akses pada pukul 11.50 WIB tanggal 12 Agustus 2021

<http://repository.uir.ac.id/786/2/bab2.pdf> akses pada pukul 13.33 WIB Tanggal 09 September 2021

<https://www.bola.com/ragam/read/4412413/pengertian-warga-negara-ketahui-fungsi-beserta-hak-dan-kewajibannya> akses pada pukul 15.05 WIB Tanggal 09 September 2021

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5624985/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya> akses pada pukul 14.59 WIB Tanggal 09 September 2021

<https://www.bola.com/ragam/read/4412413/pengertian-warga-negara-ketahui-fungsi-beserta-hak-dan-kewajibannya> akses pada pukul 16.00 WIB Tanggal 09 September 2021

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-politik.html> Akses pada pukul 13.33 WIB Tanggal 17 September 2021